

**EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SALWA AWAD ALKATRI

NIM. 0910110076



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN
GANGGUAN (HO).

Identitas Penulis :

a. Nama : SALWA AWAD ALKATIRI

b. NIM : 0910110076

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS.

Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

NIP: 19510825 1979031004

NIP: 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendy, SH. MH.

NIP: 19600810 198601 1

**EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO)**

ABSTRAK

Salwa Awad Alkatiri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, salwa12_alk@yahoo.com, EFEKTIVITAS PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG IZIN GANGGUAN (HO), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS. Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Rentannya bisnis di bidang restoran dan spa akan menimbulkan berbagai gangguan, maka diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang dituangkan dalam skripsi ini yakni mengenai bagaimanakah Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan model pendekatan sosiologis. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III dan bab IV. Setelah dilakukan pengujian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil analisa mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum efektif. Hal itu dikarenakan peraturan tersebut tidak berhasil diterapkan di lapangan serta tidak memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan sehingga tidak dapat meminimalisir pelanggaran. Sedangkan, berdasarkan hasil analisa aparaturnya penegak hukum, serta mengenai prasarana dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan sudah efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya profesionalisme dan kefokusannya pegawai BP2T Kota Malang dalam memberikan pelayanan perizinan, khususnya mengenai izin gangguan (HO) serta prasarana guna menunjang pelayanan perizinan yang lebih baik, hal tersebut juga sudah tercapai. Sedangkan, berdasarkan analisa kesadaran masyarakat secara keseluruhan juga dirasa belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kejujuran serta kepatuhan masyarakat yang berperan penting dalam perizinan khususnya izin gangguan (HO). Sehingga dengan keadaan seperti itu peraturan mengenai izin gangguan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak memberikan keuntungan bagi Daerah dalam pendapatan Kas Daerah.

Kata Kunci: Izin Gangguan (HO).

ABSTRACT

Vulnerability of businesses in the restaurant and the spa will give rise to various disorders, it is necessary to prevent a nuisance permit the bad possibilities that might occur. Just as a business activity can cause disruption for sure at least a living environment around the business premises. To the authors take two kinds of problems outlined in this paper on How the effectiveness of Article 2 of Regulation No Malang area. 16 Year 2007 on Disturbance Permit (HO) associated with the licensing business interruption Tlogomas Dhoghadho in Malang and the factors that influence the effectiveness of Article 2 of Regulation 16 of Malang 2007 related to the licensing business interruption Dhoghadho in Tlogomas Malang city. Research methods used by the author is the juridical model of empirical sociological approach. The author uses primary and secondary data sources are arranged in a systematic sequence of the chapters I, Chapter II, Chapter III and Chapter IV. After testing, the conclusion in this study is: Based on the analysis of the substance of the legislation as a whole can be said to be not effective. That's because the law was not applied successfully in the field and do not facilitate the public in understanding the rule so as to minimize violations. Based on the analysis of law enforcement officials, as well as the infrastructure to permit service overall has been effective. This has been achieved due to the professionalism and employee kefokusannya BP2T Malang in licensing services, in particular regarding the nuisance (HO) and the infrastructure to support better licensing service has also been achieved. Based on the analysis of the overall public awareness has not been effective. This is due to lack of awareness and honesty and compliance community plays an important role in licensing specifically permits interference (HO). So with such a state permit regulations regarding interference can not be run effectively and not to benefit the region in treasury income.

Keywords: Disturbance Permit (HO)

A. PENDAHULUAN

Izin gangguan atau *Hinder Ordonantie* (HO), berasal dari bahasa Belanda *Hinder* berarti gangguan dan *Ordonantie* artinya peraturan. Pengertian HO sendiri yaitu sebuah izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha di sekitarnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, perlu pengendalian dan pengawasan secara normatif. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ijin Gangguan pada tanggal 26 November 2007 yang di dalamnya terdapat 26 pasal yang terkait dengan Ijin Gangguan. Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007, yang menarik adalah adanya pasal yang menyebutkan bahwa Pengaturan izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Hal tersebut telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 pada pasal kedua. Dapat disimpulkan bahwa ketika suatu izin gangguan HO dikeluarkan harus diadakannya peninjauan kembali terhadap asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan. Jika tidak adanya manfaat dalam kegiatan usaha tersebut maka seharusnya tidak diperbolehkan kepada si pemilik usaha untuk dapat mengantongi izin gangguan HO seperti layaknya disebutkan dalam pasal kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tersebut. Jika ditinjau lebih lanjut permasalahan seperti ini dinilai sebagai suatu masalah yang kurang penting namun memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah yang seharusnya paling berperan aktif untuk menangani masalah-masalah seperti ini.

Dari latar belakang diatas yang akan dibahas lebih lanjut merupakan suatu tempat usaha yang terletak di Kota Malang Jawa Timur. Tempat tersebut adalah suatu tempat usaha yang sangat di protes oleh warga masyarakat sekitar karena di tempat tersebut telah diketahui bahwa terdapat tindakan-tindakan yang

tidak sepatasnya dilakukan secara legal di tempat tersebut. Telah diketahui masyarakat sekitar bahwa adanya pijat *plus-plus* di tempat tersebut. Masyarakat mengetahui hal tersebut karena tempat ini merupakan cabang dari usaha yang sebelumnya hanya berada di Kota Batu Jawa Timur dan usaha tersebut membuka cabang di Kota Malang Jawa Timur. Masyarakat sangat menolak usaha tersebut di buka cabang karena ketakutan terhadap kerusakan moral masyarakat Malang Jawa Timur. Tempat usaha utama yang terletak di Batu Jawa Timur sudah terkenal dengan adanya pijat *plus-plus* di tempat tersebut. Karena itulah masyarakat Malang Jawa Timur tidak ingin adanya tindakan tidak bermoral tersebut berada di kalangan mereka. Upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat juga sudah banyak dan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi agar pemerintah dapat menarik izin usaha tempat tersebut namun yang dilakukan masyarakat tersebut dapat dibilang sia-sia karena sampai detik ini usaha tersebut masih tetap berjalan.

Dhohadho Resto and Spa yang berlokasi di Jalan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur yang dijadikan tempat pijat plus-plus dengan berlabel resto dan spa. Tempat Dhohadho ini merupakan tempat maksiat berlabel Resto dan Spa. Didalamnya disediakan minuman keras, hiburan, dan transaksi prostitusi, yakni pijat plus-plus dengan wanita berpakaian seronok, karaoke yang tidak lepas dari minuman keras, dan mandi uap (spa) bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang hanya ditutup handuk.

Dibukanya Dhohadho ini sangat membahayakan warga dan mahasiswa karena tempat maksiat ini sangat berdekatan dengan tempat peribadatan. Selain itu, di sekitar kawasan tersebut yaitu kawasan Tlogomas Kota Malang Jawa Timur merupakan kawasan pendidikan yang dapat meresahkan warga sekitar bahkan dapat merusak moral khususnya anak muda di kota Malang dengan hadirnya tempat maksiat Dhogado.

Dari penjelasan diatas, penulis akan meneliti Efektivitas izin gangguan HO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang kepada usaha Dhohadho dan kesesuaian izin gangguan HO yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang dengan syarat-syarat dikeluarkannya izin gangguan HO berdasarkan Keputusan

Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO) terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat teoritis

Dosen, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum administratif yang terkait dengan pengaturan perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Mahasiswa:

- a. Sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

D.2. Manfaat Praktis

- a. Penegak hukum yaitu Hakim sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan masalah keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- b. Masyarakat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan agar dapat mengetahui apa saja yang berkaitan dengan keabsahan serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
- c. Peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penegakan hukum yang terkait dengan masalah keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) serta syarat-syarat keputusan diberikannya izin gangguan (HO) oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

E. PEMBAHASAN

E.1. Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) terhadap pemberian Izin Gangguan (HO) kepada usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang.

Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan ini memberikan suatu isyarat bahwa pengaturan izin gangguan yang dilaksanakan harus berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

Mengacu dari permasalahan ini maka menurut peneliti bahwa efektif atau tidak suatu aturan hukum termasuk pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa Efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai, maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan dilapangan terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), yakni:

- a. Adanya Undang-undang ini, pada prinsipnya sebagai aturan yang dibuat pemerintah guna memberikan perlindungan dan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maupun lingkungan alam serta tempat-tempat umum dari bahaya, gangguan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Faktor pendidikan merupakan faktor yang notabene menjadi permasalahan terkait dengan izin usaha Dhoghadho Resto and Spa, karena sebagian besar masyarakat setempat adalah masyarakat awam yang kurang mengerti produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi secara rutin oleh pemerintah sangat berguna bagi masyarakat agar dapat lebih memahami apa yang menjadi hak dari masyarakat.

E.2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2007 terkait dengan pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho di Tlogomas Kota Malang

Efektivitas pelaksanaan dari suatu produk hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO), faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, faktor prasarana yang berupa fasilitas guna menunjang Efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dan faktor masyarakat yang berdomisili di kawasan usaha Dhoghadho Resto and Spa di Kota Malang.

E.2.1. Faktor Substansi Peraturan Daerah

Substansi hukum dibahas dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO).

Efektivitas hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengatur tingkat Efektivitas pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pengaturan izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta perlindungan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

E.2.2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang yang memiliki peran yang sangat penting

dalam memberikan pelayanan perizinan, yang salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan perizinan gangguan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan izin gangguan hanya melihat dari segi fisik suatu bangunan, jika bangunan tersebut dimohonkan untuk menjalankan usaha restoran dan spa, izin gangguan (HO) tersebut harus secepatnya dikeluarkan agar si pemohon dapat segera menjalankan usahanya. Tetapi jika terjadi penyalahgunaan fungsi bangunan tersebut maka yang berwenang untuk mengurus adalah aparat Kepolisian Kota Malang bukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

E.2.3. Faktor Prasarana

Pelayanan di bidang perizinan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang telah menggunakan sistem satu pintu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu mengenai pelayanan perizinan.

E.2.4. Faktor Masyarakat

Dalam Masyarakat, yang mempengaruhi Efektivitas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat

dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini khususnya yaitu pihak yang merasa terganggu atas pemberian izin gangguan usaha Dhoghadho Resto and Spa di Jalan Tlogomas Kota Malang oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang.

F. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Efektivitas pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan hasil analisa mengenai substansi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dapat dikatakan belum efektif. Hal itu dikarenakan peraturan tersebut tidak berhasil diterapkan di lapangan serta tidak memudahkan masyarakat dalam memahami peraturan sehingga tidak dapat meminimalisir pelanggaran.
2. Berdasarkan hasil analisa aparatur penegak hukum, serta mengenai prasarana dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan telah efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapai profesionalisme dan kefokuskan pegawai BP2T Kota Malang dalam pelayanan perizinan, khususnya mengenai izin gangguan (HO) serta prasarana guna menunjang pelayanan perizinan yang lebih baik juga sudah tercapai.

3. Berdasarkan analisa kesadaran masyarakat secara keseluruhan belum efektif.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan kejujuran serta kepatuhan masyarakat yang berperan penting dalam perizinan khususnya izin gangguan (HO). Sehingga dengan keadaan seperti itu peraturan mengenai izin gangguan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak memberikan keuntungan bagi Daerah dalam pendapatan Kas Daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah masih terdapat banyak kendala/hambatan yang dialami oleh pihak BP2T Kota Malang di lapangan. Hal ini merupakan salah satu hambatan Efektivitas pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007, kendala/hambatan yang dialami oleh BP2T Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian *Lightdruk* dengan kenyataan di lapangan.
2. Kesulitan dalam hal sosialisasi khusus mengenai izin gangguan (HO).
3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat dikeluarkan izin gangguan (HO).
4. Kurangnya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penerbitan izin gangguan (HO).

Upaya yang ditempuh oleh BP2T Kota Malang dalam mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO) adalah:

1. Petugas Pemprosesan (Tim Teknis izin gangguan) berupaya melaksanakan survey di lapangan dengan lebih teliti;

2. Petugas Subbagian Penyusunan Program tetap memberikan informasi mengenai izin gangguan (HO) secara umum serta mengadakan *talk show* dalam setiap kegiatan sosialisasi perizinan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum BP2T Kota Malang beserta stafnya, berusaha untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan, dan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan surat permohonan yang diberikan kepada BP2T.
4. Pihak BP2T Kota Malang selalu berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam penerbitan izin gangguan (HO) bagi setiap tempat usaha.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Anslem Strauss, **Dasar-dasar Penelitian Kualitatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Baqir Manan, **Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945**, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir**, Tahun Akademik 2012/2013

H.B Sutopo, **Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II**, UNS Press, Surakarta, 1988,

M Hadjon, Philipus, dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002, University Press.

Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nasution, **Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik**, Rajawali, Jakarta, 1996.

Pudyatmoko, Y. Sri, **Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009

Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo 2006, Jakarta, UII Press.

Ronny H.Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan**

Singkat, Raja Grafindo, Jakarta

Sri Mamudji, **Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2007 Tentang Izin Gangguan (HO)

Situs Web:

Hidayat (1986) dalam tugas akhir Ruswati 2005, **Efektivitas Pelayanan Publik**, <http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

Prasetyo Budi Saksono (1984) dalam tugas akhir Ruswati 2005, **Efektivitas Pelayanan Publik**, <http://www.freewebs.com/lebaran/skripsi.htm>, Di akses (20 november 2012).

Wahyu, 2010, Wewenang, Delegasi, Sentralisasi dan Desentralisasi., <http://wahyu410.wordpress.com/2010/11/07/wewenang-delegasi-sentralisasi-dan-desentralisasi/>, Di akses (11 Desember 2012).

Kantor Pelayanan Perizinan Kediri, 2012, **Izin Gangguan (HO)**, http://perizinan.kedirikota.info/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66, Diakses (11 Desember 2012) .

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang, 2009, **Standar Pelayanan Publik**, <http://www.malangkota.go.id/pdf/spp/SPP-BP2T.pdf>. Di akses (11 Desember 2012).

Hilman Firmansyah, 2011, Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (Ho) Bagi Ukm (Usaha Kecil Dan Menengah) Prosedur Pengajuan Surat Izin Gangguan (Ho) Bagi Ukm (Usaha Kecil Dan Menengah). <http://binaukm.com/2011/07/prosedur-pengajuan-surat-izin-gangguan-ho-bagi-ukm-usaha-kecil-dan-menengah/>, Di akses (07 oktober 2012).

Isnu Sindang, 2012, **Prosedur Pengurusan Izin Usaha**, <http://isnusindangs.com/prosedur-pengurusan-izin-usaha/>. Di akses (07 oktober 2012).